

## EVALUASI PROGRAM PENGAWASAN MENGGUNAKAN *BODYCAM* (MODEL CIPP)

Novi Indah Earlyanti<sup>1</sup>, Tiwi Prabaningrum<sup>2</sup>, Yoeliastuti<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, <sup>3</sup>Politeknik LP3I Jakarta

Corresponding Email: [noviindaearlyanti@stik-ptik.ac.id](mailto:noviindaearlyanti@stik-ptik.ac.id), [yoeliastuti72@gmail.com](mailto:yoeliastuti72@gmail.com)

**ABSTRACT-** *Bodycam technology is used by the leadership of the Korlantas Polri to supervise members of the highway patrol (PJR) by installing a high-tech portable camera on the member's body which functions to record all activities while on duty. The implementation of this supervision needs to be evaluated with the aim of knowing the effectiveness and improving the program components. One of the evaluation models used is CIPP (Context, Input, Process, Product), with the aim of research to increase supervision and optimize technology as a means of controlling leaders over members without having to be on site. By building a theory of program evaluation, supervision, human resource management as an analytical knife that is strengthened by the concept of traffic and bodycams. This study used a qualitative approach and field research research methods. Data collection techniques used interviews, observation, and document studies, as well as qualitative data analysis techniques. Sources of informants were the Head of Sub Directorate and PJR Korlantas Polri, Head of IT Korlantas Polri, Kasie PJR Korlantas Polri, Kaurmin PJR, Head of Main PJR, Main Personnel of PJR and Command Center Personnel. The results of the research show that in context evaluation, there is no legal basis governing program implementation. Evaluation of inputs, it is necessary to increase the knowledge and skills of members, program facilities and infrastructure and effective and efficient use of the budget. Process evaluation, SOP and program implementation schedule have not been formulated. Product evaluation has been achieved but not optimal. In conclusion, each CIPP component has been running quite well, but it is necessary to increase the quality and quantity of each aspect so that the program objectives are achieved.*

**Keywords:** *program evaluation, CIPP, supervision*

**ABSTRAK-** Teknologi bodycam digunakan oleh pimpinan Korlantas Polri untuk mengawasi anggota patroli jalan raya (PJR) dengan cara memasang kamera portabel berteknologi tinggi di tubuh anggota yang berfungsi untuk merekam segala aktivitas selama bertugas. Pelaksanaan pengawasan ini perlu dievaluasi dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas dan memperbaiki komponen program. Salah satu model evaluasi yang digunakan adalah CIPP (Context, Input, Process, Product), dengan tujuan penelitian untuk meningkatkan pengawasan dan mengoptimalkan teknologi sebagai alat kontrol

pimpinan terhadap anggota tanpa harus berada di lokasi. Dengan membangun teori evaluasi program, pengawasan, manajemen sumber daya manusia sebagai pisau analisis yang diperkuat dengan konsep lalu lintas dan bodycam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian field research. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumen, serta teknik analisis data kualitatif. Sumber informan adalah Kasubdit dan PJR Korlantas Polri, Kabag TI Korlantas Polri, Kasie PJR Korlantas Polri, Kaurmin PJR, Kasie PJR Induk, Personel PJR Induk dan Personel Command Center. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada evaluasi konteks, belum ada dasar hukum yang mengatur pelaksanaan program. Evaluasi input, perlu adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota, sarana dan prasarana program serta penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Evaluasi proses, SOP dan jadwal pelaksanaan program belum dirumuskan. Evaluasi produk sudah tercapai namun belum optimal. Kesimpulannya, setiap komponen CIPP sudah berjalan cukup baik, namun perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas dari setiap aspek agar tujuan program tercapai.

**Kata kunci: evaluasi program, CIPP, pengawasan**

## **PENDAHULUAN**

Kecepatan teknologi dan informasi di era reformasi menuntut tugas dan tanggungjawab yang diemban kepolisian sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat semakin berat. Eksistensi kehadiran polisi dengan tingginya tuntutan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan keteraturan masyarakat dengan sebutan “penegak hukum kelas jalan“ yang artinya Polisi paling banyak berhubungan langsung dengan warga masyarakat dibandingkan dengan penegak hukum lainnya. (Sajipto Raharjo, 2009: 7).

Kompleksitas dan dinamika tugas Polisi di lapangan yang sangat tinggi, membuat pengawasan internal tidak maksimal dilakukan oleh organisasi. Penyebab tidak maksimal pengawasan internal karena tidak sebanding dengan lingkup pengawasan yang dilakukan (*Amnesty Internasional*, 2015). Hal ini menyebabkan banyak penyimpangan yang dilakukan oleh personel Polisi saat menjalankan fungsi dan tugas pokok yang berdampak terhadap kepercayaan publik yang menurun. Hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI) tingkat kepercayaan publik kepada Polisi mengalami penurunan menjadi 53% lebih

rendah posisinya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar 54% pada bulan Oktober 2022. Kondisi ini harus dijadikan pembelajaran penting bagi institusi Polri untuk melakukan reformasi dan evaluasi, baik secara kultural dan struktural. Sehingga Polri dapat memperbaiki dan menunjukkan kinerjanya yang profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan sesuai harapan masyarakat.

Seiring meningkatnya profesionalisme kerja, maka sepatutnya dilakukan pengawasan yang baik dalam mencegah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri. Bentuk pengawasan terhadap pelanggaran penyalahgunaan wewenang jabatan dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung (Siagian, 2005:134). Pengawasan langsung dapat dilakukan dengan inspeksi secara pribadi oleh pimpinan/pengawas dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa secara langsung di tempat lokasi, menerima laporan langsung dari pelaksana (Situmorang, 1998:27). Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan melakukan telaah laporan tertulis yang bersifat komprehensif dan mengandung informasi yang terinci (Tery, 2003:168). Peningkatan pola pengawasan dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga sistem pengawasan dapat lebih efektif dan efisien. Pengawasan dengan menggunakan teknologi sudah digunakan oleh salah satu fungsi di tubuh Polri, yaitu lalu lintas. Dimana peran utama fungsi lalu lintas adalah untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (Turjawali). Agar kegiatan Turjawali dapat maksimal, maka anggota patroli jalan raya (PJR) dilengkapi dengan teknologi berupa alat *bodycam*. Tujuan dari penggunaan *bodycam* adalah agar pimpinan dapat memonitor dan mengawasi secara langsung anggota yang bertugas di lapangan, kendala yang dihadapi anggota, dan posisi anggota melalui GPS di ruang *command center*.

Penggunaan *bodycam* sebagai bentuk pengawasan pada anggota dinilai berhasil mengurangi komplain masyarakat terhadap kinerja anggota lalu lintas, terlihat data penurunan pelanggaran menjadi 3 kasus pada tahun 2022 dari 7

kasus di tahun 2020. Tetapi penurunan data pelanggaran ini belum signifikan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap model pengawasan yang sudah dilakukan. Dengan melakukan evaluasi terhadap program pengawasan penggunaan *bodycam* diharapkan dapat mengetahui efektifitas komponen program dalam mendukung pencapaian program. Bila diketahui hasil evaluasi tidak sesuai dengan harapan program pengawasan dengan *bodycam*, maka dapat dicari letak kekurangan dan komponen mana yang tidak bekerja dengan semestinya. Sehingga hasil evaluasi dapat menjadi masukan dan perbaikan terhadap model pengawasan anggota lalu lintas dengan menggunakan *bodycam*, dan berimplikasi pada perubahan perilaku anggota yang kurang baik saat berdinam di lapangan. Salah satu bentuk evaluasi yang dapat digunakan untuk melihat keefektifan suatu program adalah dengan melihat *context, input, process*, dan *product* (CIPP) dari penggunaan *bodycam* pada anggota lalu lintas. Dimana model CIPP dapat memberi petunjuk pada evaluator untuk berhati-hati dalam membuat kesimpulan, terutama kesimpulan tentang penyebab hasil yang diamati dan kemampuan generalisasinya terhadap situasi lain (Stufflebeam, 2017;21).

### **Teori Evaluasi Program**

Evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui efektifitas komponen program dalam mendukung pencapaian tujuan program (Arikunto & Cepi, 2010: 20). Jika diketahui hasil yang didapatkan sebagai harapan dari program tidak memuaskan maka dapat dicari dimana letak kekurangannya atau komponen mana yang tidak bekerja dengan semestinya. Evaluasi program merupakan proses untuk mengetahui dengan pasti keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan dan menganalisis informasi disajikan dalam bentuk data yang bermanfaat bagi pengambil keputusan (Alkin 1969: 2-7). Hal ini sejalan dengan pendapat Wirawan (2011: 17) bahwa evaluasi program merupakan metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memaknai informasi dalam menjawab pertanyaan dasar mengenai program. Salah satu model evaluasi program yang dapat digunakan adalah dengan melihat dari sisi *context, input*,

*process*, dan *product* (CIPP), ini dapat menjawab pertanyaan mendasar: (a) apa yang perlu dilakukan? (b) bagaimana hal itu bisa dilakukan (c) apakah itu sedang dilakukan? (d) apakah itu berhasil? (Stufflebeam, 2017;21).

Evaluasi model CIPP dikembangkan oleh Stufflebeam (1967) sebagai hasil usahanya mengevaluasi *the elementary and secondary education act* (ESEA) di Ohio State University (Arikunto & Cepi, 2009: 45). Model CIPP ini memiliki tujuan penting, bahwa evaluasi bukan untuk memberi pembuktian, tetapi untuk memperbaiki. Konsep evaluasi model CIPP memerlukan partisipasi dalam melaksanakan aktivitas yang dipilih secara keseluruhan, dan bagaimana dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan evaluasi. Model evaluasi CIPP memiliki dimensi *context*, situasi yang mempengaruhi perencanaan program pembinaan, dimensi *input* adalah kualitas masukan yang dapat menunjang ketercapaian program pembinaan, dimensi *process* merupakan pelaksanaan program dan penggunaan fasilitas sesuai dengan yang direncanakan, dan dimensi *product* adalah hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan program tersebut (Stufflebeam, 2017;23). Lebih lanjut dijelaskan oleh Sukardi (2011: 63) evaluasi model CIPP dapat melayani empat macam keputusan: (a) perencanaan keputusan yang mempengaruhi pemilihan tujuan umum dan tujuan khusus, (b) keputusan pembentukan atau *structuring* yang kegiatannya mencakup pemastian strategi optimal dan disain proses untuk mencapai tujuan yang diturunkan dari keputusan perencanaan, (c) keputusan implementasi, yaitu evaluator mengusahakan sarana prasarana untuk menghasilkan dan meningkatkan pengambilan keputusan atau eksekusi, rencana, metode, dan strategi yang hendak dipilih, (d) keputusan pemutaran (*recycling*) yang menentukan jika suatu program diteruskan maka diteruskan dengan modifikasi, dan atau diberhentikan secara total atas dasar kriteria yang ada.

### **Teori Pengawasan**

Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi, dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula (Manulang, 2002: 173).

Robert J. Mockler dikutip oleh T. Hani Handoko (1995: 360) pengawasan manajemen merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan, dan mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan.

### **Teori Manajemen SDM**

Menurut Garry Dessler yang dikutip oleh Dhoni Kurniawati (2018: 20), manajemen sumber daya manusia merupakan suatu kebijakan dan cara-cara yang berhubungan dengan aspek-aspek manajemen pemberdayaan manusia, termasuk adanya kebijakan perekrutan, seleksi, pelatihan keterampilan, hingga pada pemberian penilaian kinerja terhadap personel. Pendapat ini sejalan dengan teori MSDM yang diungkapkan oleh Handoko (2008: 5) menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah pengakuan terhadap pentingnya satuan tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang vital bagi pencapaian tujuan organisasi, dan pemanfaatan berbagai fungsi dan kegiatan personalia untuk menjamin bahwa mereka digunakan secara efektif dan bijak agar bermanfaat bagi individu, organisasi dan masyarakat.

### **Konsep *Bodycam***

*Bodycam* adalah kamera portable yang dipasang pada saku baju yang berfungsi untuk merekam seluruh aktifitas petugas, faktor keamanan, panic button, dan menjamin integritas anggota polisi di lapangan. Kamera ini memiliki desain dan ukuran yang compact dengan sejumlah fitur berteknologi tinggi, sangat tahan dan tahan terhadap air.

### **Konsep Lalu-Lintas**

Pengertian lalu lintas menurut Undang-Undang No.22 tahun 2009, disebutkan yang dimaksud dengan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang

di ruang lalu lintas jalan. Menurut Sumarsono, 1966 lalu lintas adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen, yaitu: (a) sistem headway, yaitu waktu antara dua kendaraan yang berurutan melalui sebuah titik pada suatu jalan, (b) semua jenis prasarana infrastruktur dan sarana dari semua jenis angkutan yang ada, yaitu jaringan jalan, pelengkap jalan, fasilitas jalan, angkutan umum dan pribadi, (c) jenis kendaraan lain yang menyelenggarakan proses pengangkutan, yaitu memindahkan orang atau bahan dari suatu tempat ke tempat yang lain dan dibatasi jarak tertentu.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode *field research*. Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Suharsimi (2013:121) *field research* adalah penelitian yang objeknya mengenai peristiwa atau gejala-gejala yang terjadi pada kelompok masyarakat. Oleh karena itu, dengan metode tersebut penulis dapat mengkaji perspektif partisipan yang mempunyai otoritas, data, dan informasi, maupun keterkaitannya dengan evaluasi program pengawasan pimpinan menggunakan *bodycam* terhadap anggota personel patroli jalan raya (PJR) Korlantas Polri.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen. Adapun sumber informan dalam penelitian ini adalah Kasubditwal dan PJR Korlantas Polri, Kabag TIK Korlantas Polri, Kasie PJR Korlantas Polri, Kaurmin PJR, KaInduk PJR, personel Induk PJR dan personel *Command Center*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles & Hubberman dalam Sugiyono, 2007: 204). Sedangkan untuk uji keabsahan data

menggunakan teknik triangulasi data, yaitu dengan membandingkan dan mengecek kembali suatu informasi yang diperoleh pada waktu dan alat yang berbeda (Moleong, 2014: 330-331).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan yang dilakukan secara efektif oleh pimpinan terhadap anggotanya dapat merangsang kedisiplinan dan moral kerja. Sejalan dengan penelitian Asih Wulandari (2020) bahwa Pengawasan harus dilakukan secara intensif dan terus menerus menyesuaikan dengan dinamika tugas yang ada pada masing-masing organisasi. Dalam organisasi diperlukan manajemen pengawasan yang bertujuan untuk memastikan dan menjamin apakah sasaran dan tugas yang dilakukan telah terlaksana dengan baik sesuai rencana yang dibuat (Sudibyo Triatmojo, 2005: 5). Sistem pengawasan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dengan metode pengawasan dapat dilakukan melalui sistem dan pemanfaatan teknologi, sehingga pimpinan dapat mengawasi secara langsung tanpa harus melakukan inspeksi dan observasi dilapangan. Penggunaan teknologi dalam pengawasan sudah diterapkan oleh Korlantas Polri, khususnya pada Subditwal dan PJR dengan mencanangkan program pengawasan menggunakan *bodycam*. Evaluasi program pengawasan yang dilakukan pimpinan dengan menggunakan *bodycam* dapat dilihat dari empat komponen evaluasi yang merupakan sasaran evaluasi dalam pelaksanaan program. Menggunakan model evaluasi CIPP dari Stufflebeam, dimana setiap komponen memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

### Evaluasi konteks (*context*)

Saxidalami Ekoi Putroi Widoyoko (2009: 181) mendefinisikan evaluasi konteks merupakan gambaran dan spesifikasi program tentang kebutuhan yang belum terpenuhi, latar belakang dilaksanakannya program, karakteristik individu atau pihak yang terlibat dalam program serta



tujuan program. Evaluasi konteks menekankan penilaian terhadap 4 aspek sebagai berikut: (a) dasar hukum pengawasan menggunakan bodycam, dari hasil iobservasi hukum yang mendasari adalah Undang-Undang iRepublik iIndonesia iNo.2 tahun i2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa pimpinan imengemban fungsi pengawasan iterhadap ianggotanya. Diperkuat dengan Peraturan Kapolri No. 21 tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang iSusunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri, dan Keputusan Kepala Korps LaluLintas Polri No: Kep /81/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Rencana Kerja Korps Lalu Lintas Polri TA.2022. (b) analisis kebutuhan terhadap relevansi kebijakan yang menunjang pelaksanaan program pengawasan dengan bodycam. Sejalan dengan penelitian Jaya & Ndeot (2019) bahwa pada setiap analisis konteks yang paling utama menjadi objek evaluasi ialah kebutuhan yang diperlukan organisasi dalam menjalankan program. Hal yang dapat dilihat adalah, bodycam dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengaturan kemacetan atau kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2022 dilakukan peningkatan ketersediaan fitur-fitur bodycam meliputi record audio, live streaming, record vidio, foto, SOS dan Push to Talk (PTP), sehingga memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pelaporan dan pengaduan. (c) latar belakang pengawasan menggunakan bodycam adalah adanya Program Prioritas Kapolri (PRESISI), yaitu prediktif, responsibilitas, transparasi berkeadilan dengan tujuan menata kelembagaan, perubahan sistem dan organisasi, menjadikan sumber daya manusia Polri yang unggul di era police 4.0. Program pengawasan pimpinan menggunakan bodycam merupakan transformasi teknologi kepolisian modern dalam kegiatan pengintegrasian sistem informasi berbasis teknologi. (d) tujuan pengawasan dengan menggunakan bodycam adalah untuk mempermudah dan memperkuat fungsi pengawasan pimpinan, sehingga meminimalisir pelanggaran, dan sebagai alat pelindung diri anggota selama menjalankan tugas di lapangan. Kelemahan dari bentuk pengawasan dengan menggunakan bodycam belum ada payung hukum dan SOP. Maka diperlukan konsep yang matang untuk menunjang

program pengawasan dengan bodycam, sehingga program dapat terealisasi dan kebutuhan organisasi terpenuhi.

### **Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*)**

Berdasarkan teori *CIPP* yang dikemukakan oleh Stufflebeam (2001), evaluasi masukan merupakan evaluasi terhadap perencanaan program dan pengalokasian sumber daya. Orientasi utama dalam evaluasi masukan adalah untuk membantu menentukan intervensi dalam program, berguna untuk meningkatkan pelayanan terhadap penerima manfaat. Evaluasi masukan menilai program (*work plan*) yang diajukan dan *budget* dalam pelaksanaan. Dalam evaluasi masukan, terdapat beberapa aspek yang dievaluasi, diantaranya:

#### **Perencanaan**

Aspek ini menekankan pada sejauhmana kematangan perencanaan program, apakah rencana kegiatan (*workplan*) yang dirancang sudah berjalan dengan baik atau belum. Perencanaan dapat memberikan gambaran bagaimana program yang akan dilaksanakan, sehingga pelaksanaannya tidak keluar dari konteks yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Tjokroamidjojo (dalam Syafalevi, 2011: 28) perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan sumber yang ada supaya efektif dan efisien. Perencanaan pendistribusian *bodycam* dapat dilihat dari *Torr of Reference* dimulai dari melakukan inisiasi proyek, *meeting* dengan pihak terkait, instalasi alat dan jaringan, uji coba perangkat, pelatihan pengoperasionalan perangkat, hingga pendistribusian alat. Dari hasil evaluasi masukan ditemukan, bahwa perencanaan sebelumnya kurang matang, karena perencanaan pengoperasionalan *bodycam* belum dirumuskan kedalam rencana kegiatan, baik rencana harian, mingguan ataupun bulanan. Namun perencanaan pendistribusian alat sudah dirumuskan didalam matriks perencanaan pendistribusian alat hingga pelatihan.

	Activity	Tahun 2022							
		November				Desember			
	<b>Perangkat Bodycam Korlantas Polri Tahun Anggaran 2022</b>								
	<b>Inisiasi Proyek</b>								
	Kick-Off Meeting								
	<b>Instalasi</b>								
	Pemesanan Perangkat Ke Distributor / Principle								
	Instalasi Di Setiap Pjr Induk								
	<b>Pengujian Perangkat</b>								
	Persiapan Pengujian Perangkat								
	Pengujian Perangkat								
	Dokumentasi								
	<b>Pelatihan</b>								
	Pelatihan Pengguna								
	Dokumentasi								
	<b>Serah Terima Alat</b>								
	<b>Pendistribusian Alat Ke Induk Pjr</b>								

Matriks Perencanaan Pendistribusian *Bodycam* Tahun 2022

### Sumber Daya Manusia

Pada aspek ini merupakan proses terencana memodifikasi sikap atau perilaku pengetahuan, keterampilan melalui pengalaman belajar dan latihan, agar anggota PJR lebih memahami fitur yang ada pada perangkat *bodycam*. Hal ini

sejalan dengan pendapat Rivai (2009:212) pelatihan adalah proses secara sistematis untuk mengubah tingkah laku seseorang berdasarkan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan. Didukung oleh Sedarmyanti (2010:164) bahwa pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan para karyawan sesuai dengan perubahan teknologi dalam suatu organisasi serta mempersiapkan karyawan yang akan segera diberikan tugas mengerjakan pekerjaan yang telah ada dalam organisasi. Dari hasil evaluasi diketahui masih ada Induk PJR yang belum melaksanakan pelatihan yaitu Induk Bitung, Cikampek, dan Cipularang, hal ini disebabkan oleh keterbatasan teknisi eksternal dari pihak kedua untuk memberikan pelatihan, dan belum ada teknisi internal yang menguasai sistem *bodycam*, serta keterbatasan jarak dan waktu anggota untuk melakukan pelatihan. Selain itu materi pelatihan harus disesuaikan dengan kendala di lapangan, seperti bila kamera dalam keadaan tersadap apa yang harus anggota lakukan, bila kamera rusak terkena hujan, bila alat tidak dapat menangkap sinyal (*jammer*), bagaimana tindakan selanjutnya. Selain kepada anggota, pelatihan juga diberikan kepada petugas *Command Center*, meliputi mekanisme operasional penggunaan *dashboard bodycam* berfungsi untuk memonitor alat yang sedang digunakan, seperti mekanisme menampilkan lokasi dan posisi *bodycam*, menampilkan *live streaming*, menampilkan anggota dari setiap grup, menambah dan mengurangi anggota setiap grup, bagaimana menampilkan SOS dan PTT pada *dashboard bodycam*.

#### Data Pelatihan Pada Induk PJR

o	Induk PJR	Jumlah Peserta Pelatihan	Ket
.	Induk PJR Serang	20 Personel	Kamis, 26 Januari 2023
.	Induk PJR Borr-Bocimi	10 Personel	Selasa, 31 Januari 2023
.	Induk PJR BSD	15 Personel	Kamis, 2 Februari 2023

.	Induk PJR	-	Belum Melaksanakan
.	Cikampek		
.	Induk PJR	35 Personel	Senin, 26 Desember 2022
.	Jagorawi		
.	Induk PJR	-	Belum Melaksanakan
.	Bitung		
.	Induk PJR	-	Belum Melaksanakan
.	Cipularang		

Sumber: Urmin Seksi PJR Korlantas Polri

### Sosialisasi Program Pengawasan

Aspek sosialisasi program adalah proses mengkomunikasikan program institusi kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan pengenalan dan penghayatan dalam lingkungan tertentu (Widjaja, 2008: 31), dalam hal ini untuk mengenalkan program pengawasan dengan alat bantu *bodycam*. Berdasarkan evaluasi masukan sosialisasi hanya terfokus pada Subditwal dan PJR, tidak pada direktorat lain, sosialisasi tidak diberikan kepada masyarakat secara langsung, seharusnya bisa memanfaatkan media sosial sebagai literasi digital untuk melakukan sosialisasi suatu program yang sedang berjalan kepada masyarakat, dan belum ada unggahan yang membahas mengenai penggunaan dan pengoperasionalan *bodycam*.

### Sarana dan Prasarana

Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari terpenuhinya kelengkapan sarana dan prasarana yang memenuhi standar. Kelengkapan sarana dan prasarana pada program pengawasan akan memperlancar segala aktivitas, terutama proses pengawasan terhadap anggota PJR, yang pada akhirnya akan meningkatkan disiplin dan integritas anggota PJR dalam menjalankan tugas. Dalam mengevaluasi sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas program

pengawasan dapat dilakukan melalui proses observasi di *Command Center*, Induk Jagorawi dan Ruang Kerja Kasubditwal dan PJR. Adapun sarana dan prasarana yang dievaluasi diantaranya : (1) *Bodycam*, pertama kali diadakan pada tahun 2020 sebanyak 100 alat, dan belum dilengkapi dengan fitur canggih. Kemudian tahun 2022 Korlantas melakukan penambahan alat sebanyak 150 buah dengan menambah fitur-fitur pada alat guna menunjang program pengawasan pimpinan dan keselamatan anggota dalam menjalankan tugas dilapangan. Pendistribusian alat baru tersebar di 7 Induk PJR, dimana Induk Jagorawi dan Cikampek memperoleh lebih banyak dari yang lain, dengan pertimbangan jumlah anggota yang ada. (2) Layar Monitor, dari hasil observasi jumlah layar monitor ada 8 buah dan 1 layar monitor besar. (3) *Server bodycam*, *server* pada alat *bodycam* berada satu pintu dibagian TI Korlantas Polri, *server* tersebut disediakan untuk seluruh sistem yang ada di Korlantas Polri. Diberlakukannya system satu pintu agar setiap kendala yang terjadi dapat segera ditangani. Hal ini juga berkaitan dengan keamanan data yang ada pada sistem Korlantas, termasuk *bodycam*. *Server bodycam* telah memenuhi sertifikasi ISO 9001, 14001 dan 45001, sehingga keamanan data terjamin. Terdapat 4 PC yang terinstall oleh *Dashboard bodycam* dan terkoneksi pada layar monitor untuk memudahkan pengawasan. *Dasboard bodycam* dapat menampilkan 8 tampilan layar *live streaming* secara langsung dalam satu PC.

### Data Pendistribusian Perangkat *Bodycam*

**Pada Induk PJR Korlantas Polri Tahun 2022**

o	Nama Satker	Jumlah yang dimiliki pada tahun 2020	Penambahan pada tahun 2022
.	Induk PJR Bitung	10 unit	15 unit
.	Induk PJR Borr	10 unit	15 unit
.	Induk PJR BSD	10 unit	15 unit
.	Induk PJR Cikampek	20 unit	30 unit
.	Induk PJR Cipularang	10 unit	15 unit
.	Induk PJR Jagorawi	20 unit	20 unit
.	Induk PJR Serang	10 unit	15 unit
.	Subditwal Korlantas Polri	10 unit	15 unit
	Total	100 unit	150it

Sumber: Urmin Seksi PJR Korlantas Polri

**Anggaran Program**

Menurut Laird (1982: 215) dalam Sugiyono (2002: 120) manajemen yang baik dalam bidang apapun adalah manajemen yang mampu menggunakan sumber dana yang sekecil-kecilnya untuk mencapai hasil yang maksimal. Pengadaan alat *Bodycam* dilakukan kerjasama dengan pihak ke dua PT. Gamma Maya Cyberindo yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan *bodycam* yang kedua merupakan produk dalam negeri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri Khusus untuk pengadaan barang atau jasa. Pengadaan perangkat *bodycam* tahun 2022 berkerjasama dengan PT. Gamma Maya Cyberindo dengan nama program peningkatan sarana dan prasarana apatur Polri. Total harga Kontrak sebesar Rp. 11.628.966.837 (sebelas miliar enam ruatus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enamdelapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

### **Evaluasi Proses**

Evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur, rancangan implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program, dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Pada dasarnya evaluasi proses diarahkan untuk mengetahui seberapa jauh rencana yang telah dilaksanakan dalam program, apakah sudah terlaksana sesuai dengan rencana dan komponen apa yang perlu diperbaiki. Dalam melakukan evaluasi proses, perlu menganalisa prosedur pengoperasionalan pengawasan menggunakan *bodycam*, orang yang terlibat dalam pelaksanaan program dan dapat dijabarkan dalam beberapa komponen program pengawasan, diantaranya: (1) Standar Operasional Prosedur (SOP), merupakan suatu sistem yang dirancang guna menertibkan, merapikan dan memudahkan suatu pekerjaan. SOP berisi indikator-indikator teknis, dan prosedur kerja yang saling berkaitan dan dapat dijadikan sebagai alat evaluasi untuk mengukur kekuatan dan kelemahan program yang sedang berjalan. Laksmi, dkk (2008: 52) mendefinisikan SOP merupakan aspek penting yang dapat membantu personel dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan untuk mendapatkan hasil kerja yang efektif dan efisien. Dari hasil observasi, SOP penggunaan *bodycam* belum dibuat oleh Korlantas Polri, hal ini berarti tidak ada standar operasional prosedur yang dijadikan acuan kinerja para pelaksana program sehingga segala sesuatu tidak dapat diketahui capaian yang dicapai (Stufflebeam, 2001). (2) Jadwal Kegiatan Program Pengawasan,



akibat belum adanya SOP maka jadwal kegiatan pun tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemakaian bodycam hanya berdasarkan piket induk yang ada (1x24 jam) yang terbagi dalam 3 regu piket, dan tergantung pada arahan KaInduk. (3) Kinerja Penyelenggara Program. penyelenggara program pengawasan dibagi menjadi 3 subyek, yaitu pimpinan, anggota PJR dan Operator *command center*. Secara keseluruhan kinerja pimpinan dalam melaksanakan pengawasan sudah cukup baik meskipun belum optimal dalam pemberian *reward* dan *punishment*. Anggota PJR sebagai objek pengawasan, wajib menggunakan *bodycam* pada saat melaksanakan piket. Belum adanya SOP yang jelas, sanksi tegas yang diterapkan pimpinan dalam pelaksanaan program, menjadi kurang maksimal pelaksanaan program. Sedangkan operator *command center* bertanggungjawab atas pemantauan seluruh aplikasi yang ada di KorlantasPolri yang terintegrasi dalam satu ruangan, walaupun baru sebagian anggota yang mendapat pelatihan mengenai *dashboard*. (4) Hambatan dalam pelaksanaan program, hambatan yang ditemui adalah kurangnya sumber daya yang memadai. Pelatihan yang kurang maksimal, sarana dan prasarana yang terbatas, alat yang sudah terdistribusikan tidak semuanya dapat digunakan dengan baik. Tidak ada aturan yang mengikat bagi seluruh penyelenggara program pengawasan, sehingga tidak ada acuan dan pedoman terhadap ketegasan sanksi yang diberikan kepada pimpinan maupun anggota apabila tidak menjalankan program pengawasan dengan baik.

### **Evaluasi Hasil (Product)**

Evaluasi hasil merupakan tahap terakhir yang dilaksanakan untuk mengukur hasil program yang telah dijalankan. Mengalisa apakah tujuan penyelenggaraan program *bodycam* sudah tercapai dengan melihat integritas dan profesionalisme anggota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dari hasil observasi, ternyata setelah dilaksanakannya program *bodycam*, pelanggaran yang dilakukan oleh anggota mengalami penurunan, walaupun belum signifikan, hal ini sepadan dengan penerapan program yang belum maksimal. Dimana

anggota dengan sigap melaporkan kejadian yang menonjol mengenai keadaan lalu lintas, selalu mengaktifkan *live streaming* ketika berhadapan dengan masyarakat, hal ini menunjukkan anggota dapat merubah dirinya memiliki integritas dan profesionalisme serta menaikkan citra polri dimata masyarakat. Hasil Lembaga Survei Indonesia, menunjukkan tren kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian mengalami peningkatan dari 53% pada Oktober 2022 menjadi 61% pada Februari 2023. Peningkatan tren tersebut dipengaruhi oleh upaya memperbaiki institusi Polri pada seluruh komponen yang ada didalamnya. Melakukan reformasi internal Polri dengan mengembangkan program pengawasan dalam mencegah adanya penyimpangan seperti pungli yang dapat meresahkan masyarakat. Dari analisa tersebut, dapat disimpulkan bahwa produk yang dihasilkan sudah mencapai tujuan dari program, namun hasilnya belum maksimal dan perlu perbaikan dari berbagai aspek guna mencapai hasil yang diinginkan dari program.

## SIMPULAN

Program pengawasan *bodycam* belum sepenuhnya mencapai tujuan, karena masih banyak permasalahan dalam pelaksanaan program pengawasan. Secara evaluasi kontek, belum dirumuskan dasar hukum yang mengatur pelaksanaan program pengawasan menggunakan *bodycam*. Evaluasi masukan, pada aspek sumber daya manusia masih ada anggota yang belum ikut pelatihan, dari aspek sarana dan prasarana, jumlah alat tidak sesuai dengan kebutuhan, dan kebutuhan anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan program. Secara evaluasi proses belum ada SOP pelaksanaan program, tidak adanya jadwal pelaksanaan program pengawasan, dan belum ada tegasanan pimpinan dalam memberikan sanksi dan hukuman kepada anggota yang tidak menggunakan *bodycam*. Dan dari evaluasi produk, jumlah angka pelanggaran mengalami penurunan tetapi belum signifikan.

Dirasa perlu untuk membuat dasar hukum khusus untuk program pengawasan,

merumuskan Standar Operasional Presedur (SOP) penggunaan *bodycam*, melakukan kerjasama dengan pihak kedua untuk menyempurnakan perangkat *bodycam*, menyusun rencana dan jadwal kegiatan secara terstruktur, memberikan pelatihan kepada anggota, menganggarkan pengadaan alat dalam daftar internal pagu anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. 2019. *Social Psychology*, edisi ke-9. NJ, USA: Pearson Education International: Upper Saddle River.

Daryanto. 2020. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Gava Media.

Danial, Endang dan Nanan Wasriah. 2021. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan

Eko Putro Widoyoko. 2016. *Evaluasi Program Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Fahmi, Irham. 2020. *Perilaku Organisasi Teori Aplikasi dan Kasus*. Rajawali Pers.

Farida Yusuf Tayibnapi. 2021. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Gall, M.D., Joyce, P., & Borg, W.R. 2020. *Educational research (10th ed)*. Boston: Pearson Education, Inc.

Hanafi, M Mamduh, 2014, *Manajemen*, Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN

Husein Umar. 2021. *Riset SDM Dalam Organisasi*, Jakarta: PT SUN.

Lijan Poltak Sinambela. 2021 *Manajemen Sumber Daya Manusia: membangun tim kerja yang solid untuk meningkatkan kinerja*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Malayu S.P Hasibuan. 2020. *Manajemen Sumber Daya Manusia (edisi ke-19)* Jakarta: Bumi Aksara, 2017

- Manullang, M. 2020. *Manajemen*. Yogyakarta : UGM Press.
- Maringan Masry Simbolon. 2020. *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mutrofin. 2016. *Evaluasi Program Teks Pilihan untuk Pemula*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Putranto, L.S., 2018. *Rekayasa Lalu Lintas*. Cetakan Pertama, PT Mancanan Jaya Cemerlang.
- Siagian, Sondang P, 2015, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Edisi Revisi Cetakan Pertama, Jakarta: Bumi Aksara.
- Stufflebeam, D.L. H McKee and B McKee. 2003. The CIPP Model for Evaluation. *Paper presented at the 2003 Annual Conference of the Oregon Program Evaluation Network (OPEN)*. Portland: Oregon.
- Stufflebeam, D.L. Guili Zhang. 2017. *The CIPP Evaluation Model: How to Evaluate for Improvement and Accountability*. New York: The Guilford Press
- Sudibyo Triatmodjo. 2000. *Sistem Pengawasan*. Jakarta : LAN
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto & Cepi Safruddin Abdul Jabar. (2009). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukardi. 2019. *Evaluasi Pendidikan, Prinsip dan Operasionalnya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suwanto dan Prisa. 2018. *Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, Bandung: Alfabeta
- Ridwan HR. 2020. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo
- Terry, George R. 2020. *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.

T. Hani Handoko. 2019. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.

Wirawan. 2018. *Evaluasi: teori, model, standar, aplikasi dan profesi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Dhoni, Kurniawati. 2018. "Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Relevansinya Dengan Manajemen Modern," Kementrian Agama Lampung Timur Vol.11, No. 1.

Jaya, P. R. P., & Ndeot, F. 2019. "Penerapan Model Evaluasi Cipp Dalam Mengevaluasi Program Layanan Paud Holistik Integratif". PERNIK: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 1(1), 10.

Mahmudi, Ikhwan. 2011. CIPP : "Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan". *Jurnal At-Ta'adib*. Vol 6 No.1.

Muryadi, Agustanico Dwi. 2017. "Model Evaluasi Program Dalam Model Penelitian Evaluasi". *Jurnal Ilmiah Penjas*. Vol. 3 No.1

Purnomo, Yosua Hoggly Parulian, dan Thomas Budhi Santoso. 2020. "Evaluasi Program Seleksi Di Sekolah "XM" Dengan Metode Evaluasi CIPP". *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akutansi dan Perpajakan*. Vol. 3 No. 2.

Purwadi. 2017. "Pengaruh Pengawasan Langsung Dan Tidak Langsung Terhadap Efektifitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda". *Jurnal Akuntabel* Vol. 14 No. 2.

Wijayanti, Nova Indah, Rita Yulianti, & Bagus Wijaya. 2019. "Evaluasi Program Pendidikan Pemakai Dengan Model CIPP Di Perpustakaan Fakultas Teknik UGM". *Jurnal Ilmu Pustaka dan Informasi* Vol. 3 No.1.